



Profesionalisme Penyuluh Dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) di Kota Pekanbaru

Azra Alfia Fitri¹, Adianto²

^{1,2,3}Universitas Riau

Abstract

Received: 4 November 2022
Revised: 6 November 2022
Accepted: 9 November 2022

Pekanbaru City is one of the cities with a population of 1,028,237 people. This will have an impact on uncontrolled population growth if it is not immediately overcome by implementing the maximum family planning program. The role of extension workers is very important in providing information regarding the importance of implementing family planning. So to be able to assess the implementation of family planning counseling, it is necessary to assess based on skills, professionalism, and responsibility and identify inhibiting factors in the implementation of the kb program counseling. In carrying out this research, researchers used qualitative methods with a descriptive approach. The results of this study also explained that the implementation of counseling for the family planning program by extension workers during the Covid-19 pandemic has been maximized. information because the use of this technology is one of the connecting media in providing information, the number of Human Resources (HR), namely extension workers, needs to be increased in quantity and there is still low community participation in carrying out the family planning (KB) program.

Keywords: Professionalism, Implementation, Family Village

(*) Corresponding Author: azraalfiaa@gmail.com

How to Cite: Fitri, A., & Adianto, A. (2022). Profesionalisme Penyuluh Dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kb) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 49-59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7321658>

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk pindah ke kota ini. Kota Pekanbaru merupakan kota multi-etnis yang berasal dari Sumatera Barat (Minangkabau), Batak, dan Jawa. Serta terdapat Suku Melayu yang berasal dari; Kampar, Rokan, Siak, Indragiri dan Bengkalis. Sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru hidup sebagai pengusaha, pegawai/karyawan dan pedagang. Hal ini sesuai dengan visi Kota Pekanbaru 2021 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”. Kemudian diterjemahkan dalam misi pertama Kota Pekanbaru yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi. Hal ini menandakan bahwa misi Kota Pekanbaru memerlukan dukungan nyata dalam bentuk tata kelola penduduk dan pengendalian penduduk yang terencana. Langkah nyata ini merupakan jalan menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.



Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan memantapkan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dibawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru serta Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Mengingat laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 sebesar 2,49%, meningkat tahun 2018 menjadi 2,7% dan tahun 2019 menurun menjadi 2,47%. Hal ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru diatas rata-rata nasional yaitu, 2,3%. Maka Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kota Pekanbaru merupakan upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mampu menurunkan angka fertilitas. Hingga saat ini Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk 1.028.237 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020) atau 301.226 keluarga, meningkat dibandingkan tahun 2010 berjumlah 897.768 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010). Artinya, jumlah penduduk Kota Pekanbaru meningkat sebanyak 130.469 jiwa dalam sepuluh tahun. Mengingat pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru yang cukup tinggi, maka diperlukan satu program yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui pengendalian kelahiran. Karena masalah yang akan timbul akibat jumlah penduduk yang padat adalah permasalahan lahan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. OPD ini juga berperan dalam mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) Pemerintah periode 2015 - 2019, terutama pada Agenda Prioritas Nomor 5 (lima) dan Nomor 3 (tiga) yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" dan "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan". Oleh sebab itu dalam upaya perluasan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terciptalah Program Kampung KB sebagai inovasi strategis dalam upaya realisasi pelaksanaan kegiatan program KKBPK secara utuh dan terintegrasi antar bidang baik internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru maupun lintas sektoral di lini lapangan. Peraturan yang berkaitan dengan Kampung KB (Keluarga Berencana) yaitu Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 yang ingin mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Saat ini, Kampung KB (Keluarga Berencana) berubah menjadi Kampung KB (Keluarga Berkualitas). Perubahan ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Perlu dijelaskan secara ringkas bahwa keluarga berencana berbeda dengan keluarga berkualitas. Karena tujuan akhir dari keluarga berencana adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas.

UU No.52 tahun 2009 menjelaskan keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, umur ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sedangkan keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru diberikan amanat

melaksanakan program Kampung KB yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka mendukung program Kampung KB, maka pemerintah Kota Pekanbaru membentuk 12 Kampung KB yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru. Program yang dijalankan pada Kampung KB yaitu program pembangunan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Program ini terdiri dari Catur Bina. Kelompok kegiatan ini antara lain:

- a. Bina Keluarga Balita (BKB) beranggotakan keluarga yang mempunyai balita. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan KB, bimbingan cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak, melakukan pengecekan perkembangan anak setiap bertambahnya umur melalui KKA (Kartu Kembang Anak).
- b. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan anggota keluarga yang mempunyai remaja dalam membina tumbuh kembang remajanya secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remajanya.
- c. Bina Keluarga Lansia (BKL) bertujuan untuk membentuk Lansia atau orang tua menjadi lebih produktif dan mandiri. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan senam yang dilaksanakan setiap hari Minggu, gotong royong dan kegiatan bercocok tanam yang merupakan kegiatan substansi fisik dan dimensi fisik.
- d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah melakukan KB maupun yang belum melakukan KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan kesertaan ber-KB. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah membentuk kelompok produksi rumah tangga yang mana dari kelompok tersebut akan menghasilkan produk- produk yang dapat di jual.
- e. Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) adalah suatu wadah kegiatan program Persiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkerluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Keberhasilan Kampung KB dapat diukur melalui membandingkan antara perencanaan program dan pelaksanaannya. Dampak dari program tersebut lebih lanjut diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang diukur melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dihitung menggunakan Sistem Informasi Keluarga (Aplikasi New SIGA). Maka disini perlu adanya peran penyuluh KB guna mencapai tujuan ataupun sasaran tersebut. Penyuluh KB merupakan penanggung jawab sekaligus pelaksana kegiatan BKKBN di lini lapangan. Penyuluh KB bertugas membina dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat Program Kampung KB melalui perencanaan keluarga dalam pendewasaan usia perkawinan, penggunaan kontrasepsi untuk pengaturan jarak kehamilan dan peningkatan ekonomi keluarga menuju keluarga yang

berkualitas. Kehadiran COVID-19 menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi penyulu KB dalam memberikan pelayanan terkait pemberian informasi dalam pelaksanaan KB tersebut. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, maka ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Masih terdapat Penyuluh KB Non-PNS, hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menteri PAN dan RB) Nomor 21 tahun 2018, bahwa Penyuluh KB adalah PNS. Tertera pada pasal 1 ayat 5, yaitu: “Penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKPBK).
2. Sebelum pandemi diadakan pertemuan kelompok kegiatan satu kali dalam sebulan. Saat ini pertemuan kelompok kegiatan ditiadakan dan sosialisasi dilakukan lewat WAG. Maka bisa dipahami, banyak kader KB yang kurang menguasai mengenai Catur Bina yang merupakan kegiatan Kampung KB, sehingga Penyuluh KB harus terjun langsung ke lapangan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Sesuai dengan arahan dari Plt. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, Sri Wahyuni, pada 10 Mei 2020. Semua kegiatan dilaksanakan secara e- learning dan menghindari pertemuan langsung.
3. Fenomena anak putus sekolah di Kota Pekanbaru meningkat dengan sebab ekonomi dan kekurangan sekolah (tidak sebanding jumlah SLTP dan SLTA). Hal ini dikuatkan data bahwa Provinsi Riau menempati urutan ke tiga secara nasional angka anak putus sekolah.
4. Kenyataan lain bahwa masih tingginya angka stunting pada anak di temukan di Kota Pekanbaru tahun 2021 dengan 76 balita di Kecamatan Lima Puluh, dan di Kelurahan Rejosari ditemukan 69 balita merupakan angka stunting kelurahan tertinggi. Hingga bila dikaitkan dengan Kampung KB maka ini seharusnya menjadi program prioritas. Mengingat sebab-sebab terjadinya stunting menurut Unicef Framework yaitu ada tiga faktor: asupan makanan yang tidak seimbang, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan riwayat penyakit. Sehingga bila dikaitkan dengan profesionalisme Penyuluh KB, maka bermakna kemampuan Penyuluh KB dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Hal ini selaras dengan pendapat Ramadhan (2018) tentang profesionalisme pegawai adalah kemampuan aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif serta mampu secara cepat dan tepat menanggapi aspirasi masyarakat dan perubahan lainnya sehingga dapat memuaskan masyarakat. Berdasarkan masalah-masalah diatas maka peneliti tertarik membahas tentang “Profesionalisme Penyuluh dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kota Pekanbaru.”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif. Digunakannya metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan dan memahami apa saja yang ada dibalik fenomena yang akan diteliti. Metode penelitian kualitatif dapat memberikan rincian fenomena (*the detail of the phenomenon*). Untuk memperoleh informasi maupun data dari informan peneliti menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dengan metode purposive sampling peneliti menetapkan beberapa informan yang dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan, Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB, Kepala dan Wakil Kepala Kampung KB, Penyuluh KB, Kader Kampung KB, dan Peserta Kampung KB. Sedangkan data penelitian diperoleh dari data primer (observasi, wawancara) dan data sekunder (data berasal instansi seperti arsip dokumen, buku, jurnal, dll). Adapun teknik analisis data menggunakan *Data Managing* (Mengorganisasikan Data), *Reading and Memoing* (Membaca dan Membuat Catatan), *Describing, classifying, dan interpreting* dan *Representing and Visualizing* (Menyajikan dan Memaknai Data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji tentang Profesionalisme Penyuluh dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Sipil*, yang menyatakan bahwa profesionalisme merupakan pilar yang menempatkan birokrasi sebagai mesin yang efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme terdiri dari 4 kriteria, yaitu:

1. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan Penyuluh KB untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*). Penyuluh KB memiliki pengetahuan yang didapatkan dari belajar secara formal dan/atau dari pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang terkait dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya. Hasil analisis data yang peneliti lakukan dengan mewawancarai informan yang memahami perihal tersebut telah menjelaskan bahwa kompetensi Penyuluh KB di Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini dikarenakan semua Penyuluh KB yang bertugas di Kota Pekanbaru sudah mengikuti beberapa pelatihan minimal sudah mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU) yang artinya sudah memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program-program yang berhubungan dengan Kampung KB. Selain itu respon masyarakat dalam menerima penyuluhan tersebut mendapat respon baik. Respon merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap suatu kinerja yang diperoleh dari kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh penyuluh KB tersebut. Adapun hal yang mendasari dari keberhasilan penyuluhan tersebut juga disebabkan

oleh adanya Latihan Dasar Umum (LDU) berguna bagi Penyuluh KB agar saat di lapangan mereka mempunyai ilmu dalam menangani setiap permasalahan yang ada di Kampung KB. Latihan dasar umum ini dilakukan selama 3 bulan yang terbagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama yaitu 1,5 bulan pra jabatan dan 1,5 bulan langsung praktek ke lapangan. Penyuluh KB harus mampu melakukan pendekatan formal kepada RT, RW, dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kelurahan. Kemudian belajar untuk melakukan pendekatan informal seperti pendekatan dengan PKK, Tokoh Agama, LPM, dll.

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kerja (kuantitas dan kualitas) yang telah dicapai. Efektivitas Penyuluh KB pada Kampung KB diukur dari kuantitas kegiatan yang berjalan, kualitas kerja yang dilihat seberapa besar perubahan yang terlihat pada kader-kader yang aktif, serta waktu kerja yang digunakan pada setiap kegiatan. Berikut program yang dijalankan pada Kampung KB yaitu Program Pembangunan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Program ini terdiri dari:

- a) Bina Keluarga Balita (BKB) beranggotakan keluarga yang mempunyai balita.
- b) Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan anggota keluarga yang mempunyai remaja dalam membina tumbuh kembang remajanya secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remajanya.
- c) Bina Keluarga Lansia (BKL) bertujuan untuk membentuk Lansia atau orang tua menjadi lebih produktif dan mandiri.
- d) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang belum ber KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan kesertaan ber-KB.
- e) Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) adalah suatu wadah kegiatan program Persiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkerluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Penyuluh KB berkewajiban untuk memberikan laporan rutin kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru yang mana dari laporan tersebut akan diketahui program Kampung KB yang berjalan dan tidak berjalan. Apabila ada program Kampung KB yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru akan membantu Penyuluh KB mencari solusi agar program tersebut dapat terlaksana. Program Kampung KB yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor (UPPKA), dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dapat berjalan dengan baik dikarenakan ada kerjasama dan keterlibatan aktif dari Kader KB dan Peserta KB dengan Penyuluh KB. Peran Kader KB sebagai perpanjangan tangan dari

Penyuluh KB yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada Penyuluh KB mengenai kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, peran aktif dari Peserta KB yang mengikuti kegiatan Kampung KB menjadi salah satu bukti keberhasilan Kampung KB karena masyarakat merupakan sasaran dari Kampung KB. Salah satu bentuk keberhasilan dari Kampung KB yang mampu membantu perekonomian masyarakat adalah dengan adanya program UPPKA. Program ini membantu masyarakat untuk membuat kerajinan tangan yang dapat berupa benda ataupun makanan, kemudian hasil kerajinan tersebut diperjualbelikan melalui media online maupun bazar tertentu. Kegiatan dari program UPPKA ini menjadi salah satu kegiatan yang membangkitkan semangat masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan Kampung KB. Penyuluh KB dalam hal ini berperan sebagai pihak yang harus memiliki ide kreatif untuk menyalurkan bakat dari Peserta KB yang memiliki minat di bidang kerajinan tangan, jadi Penyuluh KB bukan hanya memantau keberlangsungan kegiatan dari program UPPKA tersebut tetapi juga membantu memberikan ide kepada masyarakat dan membantu masyarakat mengetahui minat dan bakat yang dimiliki.

Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pencegahan Stunting dan Kampung KB merupakan salah satu wadah untuk membantu mensukseskan program pemerintah tersebut. PIK-R adalah program yang berisikan remaja-remaja dari Kampung KB yang saat ini bertugas menjadi SATGAS PESTA (Satuan Tugas Peduli Stunting). Kegiatannya yaitu membantu Penyuluh KB mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Stunting dan juga bergerak sebagai antisipasi di mana mereka yang tergabung dalam SATGAS PESTA menggalang dana untuk disalurkan kepada keluarga kurang mampu dalam bentuk makanan bergizi ataupun makanan sehat. Selain SATGAS PESTA juga dibentuk DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting).

3. Efisiensi

Efisiensi merupakan peran serta aktif Penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang tepat guna (hemat) dan pemanfaatan sumberdaya yang berasal dari lingkungan sekitar Kampung KB, serta pemakaian waktu yang cepat dan terjadwal dalam pelaksanaan kegiatan. Penyuluh KB untuk mencari solusi dengan cara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar kegiatan dapat terlaksana. Artinya partisipasi masyarakat ada dan harus diapresiasi. Penyuluh KB harus mampu melihat potensi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pada Kampung KB. Partisipasi dalam bentuk bantuan tempat kegiatan, biaya konsumsi, dan bisa juga donator tetap Kampung KB dapat membantu keberlangsungan kegiatan Kampung KB. Swadaya masyarakat yang merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi merupakan hal yang bagus untuk diterapkan di Kampung KB. Tidak hanya melatih agar masyarakat lebih peka untuk ikut membantu lingkungan sekitar tetapi juga membantu mewujudkan Kampung KB mandiri yang menjadikan Kampung KB tersebut lebih menyadari bahwa daerahlingkungan tempat tinggalnya memerlukan pembinaan dan bantuan secara bersama-sama untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Dukungan swadaya masyarakat ini tentu saja tidak hanya berasal dari sosialisasi yang diberikan oleh Penyuluh KB, tetapi dalam hal ini diperlukan

keikutsertaan tokoh formal dan informal yang ada di lingkungan Kampung KB untuk membantu mengajak masyarakat berpartisipasi mensukseskan kegiatan Kampung KB. Keterlibatan RT, RW, dan tokoh lainnya yang berada di tengah-tengah masyarakat dapat membantu tugas Penyuluh KB dalam mencari donator dan bantuan yang diperlukan untuk kegiatan Kampung KB.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan bentuk kesanggupan Penyuluh KB untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya di Kampung KB tempat penugasannya. Kesanggupan Penyuluh KB untuk bekerja tepat waktu, bekerja dengan baik dan terjadwal, serta berani dan ikhlas mengambil resiko di Kampung KB. Mulai dari mengatasi kendala dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan proses pelaporan untuk mensukseskan semua program pada Kampung KB. Penyuluh KB mempunyai tanggung jawab dalam wilayah tugasnya untuk menentukan jadwal kegiatan, bekerja sama dengan kader KB masing-masing poktan dan menentukan sasaran dari poktan tersebut (keluarga) yang menjadi sasaran. Intinya program-program yang direncanakan dapat terlaksana terutama program-program kesejahteraan. Penyuluh KB harus berkerjasama dengan Kader KB dan tokoh masyarakat dalam mencari cara yang tepat agar masyarakat mau terlibat dalam kegiatan Kampung KB dan memastikan semua program berjalan sesuai rencana. Kader KB sebagai perpanjangan tangan dari Penyuluh KB yang berada di tengah-tengah masyarakat harus paham mengenai program yang direncanakan di Kampung KB. Kader KB bertugas untuk membantu Penyuluh KB dalam menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih belum mengetahui makna dari Kampung KB. Selain itu, Kader KB juga bertugas membantu Penyuluh KB dalam mencari informasi mengenai masyarakat yang menjadi sasaran dari program Kampung KB. Hal ini berguna agar program yang ditujukan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil temuan penelitian ini diatas berdasarkan ukuran profesionalisme Penyuluh KB yang terdiri dari Kompetensi, Efektivitas, Efisiensi dan Tanggung Jawab dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kompetensi Penyuluh KB sudah baik. Hal ini dikarenakan semua penyuluh KB yang bertugas (PNS dan Non PNS) di Pekanbaru sudah mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU) yang artinya sudah memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program-program berhubungan dengan KB dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada elemen skill penyuluh PNS dan Non PNS sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk atau yang dilaksanakan oleh BKKBN, sehingga dapat dikatakan sudah memiliki skill sebagai penyuluh. Selanjutnya pada elemen sikap memang Penyuluh KB yang ditugaskan pada Kampung KB di Kota Pekanbaru sudah mampu berkomunikasi dengan ramah, mampu menyampaikan informasi secara tepat, rajin mendengarkan keluhan, mampu memimpin kegiatan dan cepat tanggap atas permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menawarkan solusi.
2. Efektivitas Penyuluh KB sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan sudah berjalan optimal. Namun tidak terlihat pada kualitas masing-masing pegawai karena kegiatan

- dikerjakan secara tim (bersama) antara Penyuluh KB, Kader KB, Peserta KB, dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Efisiensi Penyuluh KB sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang memaksimalkan sumber dana dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Bahkan beberapa kegiatan di Kampung KB sudah bisa dilaksanakan tanpa dana dari APBD, tetapi dari mitra kampung (perusahaan atau perorangan). Hingga Kampung KB Air Putih bertekad menjadi Kampung KB Mandiri secara pendanaan dari pemerintah.
 4. Tanggung jawab Penyuluh KB sudah baik. Keberadaan Penyuluh KB sangat penting terutama saat menyampaikan tentang operasional atau kegiatan Kampung KB yang dari pusat langsung disampaikan ke kelurahan. Hal ini tidak bisa digantikan dengan Kader KB. Kader KB hanya bertugas untuk mengumpulkan masyarakat, yang bertugas untuk menyampaikan penyuluhan dalam kegiatan tersebut adalah tetap Penyuluh KB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa profesionalisme Penyuluh dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kota Pekanbaru menemukan bahwa profesionalisme Penyuluh KB yang ditugaskan di Kampung KB sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari kriteria kompetensi bahwa Penyuluh KB yang ditugaskan di Kampung KB telah mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU). Kriteria efektivitas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan sudah berjalan optimal. Kriteria efisiensi, dapat dilihat bahwa Penyuluh KB mampu memaksimalkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan menggunakan kreatifitasnya untuk mencukupi anggaran yang diperlukan. Kriteria tanggung jawab, dapat dilihat bahwa Penyuluh KB mampu secara langsung menyampaikan tentang operasional dan kegiatan Kampung KB kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid HR Lagu, Raodhah, S., Surahmawati, & Nursia. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Pasangan Usia Subur Terhadap Program Keluarga Berencana di Kabupaten Gowa. *Al-Sihah : Public Health Science Journal*.
- Artisa, R. A. (2017). Desentralisasi Program Keluarga Berencana : Analisis Dampak Perubahan Kelembagaan Program Keluarga Berencana Pada. *Pembangunan Dan Kebijakan Publik*.
- BAPPENAS. (2015). Keluarga Berencana. *Jurnal Keperawatan*.
- Dany Prayoga. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana Kelurahan Surabaya Kecamatan. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*.
- Devi, S., Fatchiya, A., & Susanto, D. (2016). Kapasitas Kader dalam Penyuluhan Keluarga Berencana di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penyuluhan*. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v12i2.11223>
- Harmiati, Alexsnder, Triyanto, D., Maya, M., & Riasuti, F. (2020). Analisis

- Pemetaan Collaborative Governance Dalam Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*.
- Herida Pinem, L., Rohani Pardede, S., Srikurniawati, A., & Prodi DIII Keperawatan STIKes Mitra Keluarga, D. (2019). PENYULUHAN KESEHATAN TENTANG KELUARGA BERENCANA IBU NIFAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANG KITRI, MARGAHAYU, BEKASI TIMUR. *Jurnal Mitra Masyarakat*.
- Lukiastuti, F. (2021). Pengaruh Self Efficacy dan Motivasi terhadap Prestasi Kerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. *Solusi*. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.2957>
- Marwansyah. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Mulyasari, I. (2019). Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Management Review*, 2(2), 190. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i2.1786>
- Novatna, S., & Adnan, M. F. (2020). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Keluarga Berencana di Kota Padang. *Journal of Civic Education*. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.350>
- Renwarin, F. R. (2016). Motivasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Maro Kota Merauke. *E-Journal Acta Diurnal*.
- Resnawaty, R., Humaedi, S., & Adiansah, W. (2021). EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32142>
- Ridha, M. R., & Goma, E. I. (2021). Deskripsi Indikator Program Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Utara. *Geoedusains: Jurnal Pendidikan Geografi*. <https://doi.org/10.30872/geoedusains.v1i2.373>
- Roman Hadi Saputro, & Safriansyah. (2021). Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.2943>
- Setiadi, A. (2018). PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *Journal of Management Review*. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i2.1797>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1>. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Sumba, P. D., Tui, F. P. D., & Tohopi, R. (2021). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.53682/administro.v3i1.2049>
- Suparman, N., Sakti, F. T., & Engkus, E. (2018). Evaluasi Program Keluarga

- Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1781>
- Surdin, K. S. (2017). Persepsi Tentang Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Kependudukan Pada Ibu Pasangan Usia Subur Di Kelurahan Besulutu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe. *Jurnal Pendidikan Geografi*.
- Susanti, A., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*.
- Widyanto, A., Marzuki, N., Fikri, M., & Munawar, E. (2018). KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF SOSIO-KULTURAL MASYARAKAT SYARI'AT (Studi tentang Pandangan Masyarakat Aceh terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi). *Jurnal Keluarga Berencana*.
- Abdussamad, J. (2019). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*. <https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.6>
- ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME PEGAWAI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CABANG BRI TB SIMATUPANG JAKARTA SELATAN. (2015). *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v6i2.171>
- Andriyani, Y. (2016). PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA. *Administrasi Negara*.
- Birokrasi, P. (2018). *Jurnal Tata Sejuta*. 4(1), 1–13.
- Firdaus, S. U. T., & Hasbullah, H. (2020). “Revolusi Mental” Birokrasi Di Indonesia : Good Governance. *PUBLIC CORNER*. <https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.889>
- Irawan, B., & Maheri Laksono, S. S. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik, Profesionalisme, Kinerja Pegawai Sebagai Upaya Kepuasan Masyarakat (Studi Pada Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). *REVITALISASI*. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v8i1.872>
- Rusmilawati, Arifin, J., & Suparti, H. (2020). Pengaruh Profesionalisme Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ekonomi*.
- Soffa, N. A., Utari, W., & Hartati, C. S. (2019). PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI PROFESIONALISME PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Mitra Manajemen*. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i5.231>